

Analisis Keraguan Pemerintah

Dr Y Sri Susilo



PEMERINTAH akhirnya memilih kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) dengan satu harga saja (KR, 30/4/13). Kenaikan harga tersebut merupakan bentuk nyata dari kebijakan pengurangan subsidi BBM. Harga BBM bersubsidi yang semula Rp 4.500 perliter naik menjadi tidak lebih dari Rp 6.500. Kapan dan berapa kenaikan harganya belum resmi ditetapkan oleh pemerintah. Alasan pemerintah menunggu kesiapan anggaran untuk melaksanakan program kompensasi.

Kenaikan harga sebelumnya terjadi tahun 2008. Artinya, sudah 5 tahun harga BBM bersubsidi tidak berubah. Selama kurun waktu hampir 5 tahun tersebut, pemerintahan SBY sempat

* Bersambung hal 7 ke 1

Keraguan

merencanakan kebijakan untuk membatasi konsumsi dan menaikkan harga BBM bersubsidi. Setelah terjadi pro dan kontra, pemerintah kemudian menunda dan bahkan membatalkan kebijakan tersebut. Pemerintah nampak ragu memutuskan kebijakan mengurangi subsidi BBM.

Pembatasan BBM bersubsidi sebenarnya telah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2010 dan akan diterapkan pada tahun anggaran 2011 (KR, 23/11/10). Rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan pemerintah sampai dengan tahun anggaran 2012 lalu.

Pemerintah, April 2013 lalu sempat merencanakan untuk menerapkan kebijakan harga berbeda untuk BBM bersubsidi (KR, 13/4/13). Rencana kebijakan dua harga tersebut mendapat kritik dan ditentang banyak pihak, dan akhirnya pemerintah memilih membatalkan kebijakan tersebut.

Selanjutnya pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan satu harga untuk BBM bersubsidi. Terakhir pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi (KR, 11/5/13). Pembatasan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan pemasangan sistem teknologi informasi yang mendukungnya.

Pemerintah SBY seharusnya tidak ragu

untuk secara bertahap mengurangi subsidi BBM dan pada akhirnya menghapus subsidi BBM. Seperti halnya kebijakan yang diterapkan di sektor industri pengolahan, dimana sejak Agustus 2005 tidak lagi mengonsumsi BBM bersubsidi. Jika pemerintah mempunyai keberanian untuk mengurangi subsidi BBM maka anggaran subsidi BBM dapat dialokasikan ke sektor lain yang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. Jika pengurangan subsidi BBM dilakukan secara bertahap maka konsumen juga tidak merasa terlalu terbebani.

Sebagai contoh, harga BBM bersubsidi (premium dan solar) sejak tahun 2008 harganya Rp 4.500 perliter. Jika harga BBM bersubsidi tersebut naik Rp 450 perliter per tahun, maka harga BBM bersubsidi saat ini sudah mencapai Rp 6.750 perliter. Harga tersebut masih di bawah harga keekonomian yang sebesar Rp 10.000 perliter. Jadi masih ada subsidi Rp 3.250 perliter. Dengan demikian kenaikan harga BBM bersubsidi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa lain, termasuk produk yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM bersubsidi setiap tahun tersebut tentu harus diikuti dengan kebijakan ekonomi yang dapat menekan dampak negatif yang muncul.

Sambungan hal 1

Harus diakui pengurangan subsidi BBM juga akan berdampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Dampak negatif paling terasa adalah terjadinya efek kenaikan harga atau inflasi. Efek langsung terutama pada sektor transportasi, yang kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi yang menggunakan jasa sektor transportasi. Dampak negatif inflasi tersebut dapat ditekan dengan instrumen kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Di samping itu, dampak negatif juga dapat ditekan melalui kebijakan jaring pengaman sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin.

Pemerintah SBY harus belajar dari Pemerintah Soeharto dalam hal mengumumkan kenaikan harga BBM. Pada zaman Orde Baru pengumuman kenaikan harga biasanya dilakukan setelah Magrib dan berlaku pada pukul 00.00 WIB. Pengumuman dilakukan dengan segera, tegas dan dengan *timing* yang tepat. Jadi tidak ada kesan ragu-ragu seperti pada saat ini, sehingga dapat mendorong munculnya spekulasi dan ketidakpastian. Kapan dan berapa besar kenaikan harga BBM bersubsidi? Kita tunggu saja.

(Penulis adalah Dosen FE UAJY, Wakil Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta & Pengurus Pusat ISEI)-b